



# Apakah Inflasi, Pendapatan Pajak Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi? Analisis Makroekonomi di Pulau Jawa

April Kurniawan

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Indonesia

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50131

Email Korespondensi: [aprilkurniawanofficial@gmail.com](mailto:aprilkurniawanofficial@gmail.com)

**Abstract:** *The growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) as a benchmark for a region's economic growth is closely linked to regional tax revenue and government expenditure, as these policies are components of aggregate demand, whose increase will drive GRDP growth. On the other hand, inflation is an economic phenomenon that is always intriguing to discuss, particularly regarding its broad impact on economic growth. This study aims to analyze the impact of inflation, regional tax revenue, and government expenditure on economic growth across provinces in Java Island from 2010 to 2019. The data analysis method used is Vector Autoregression (VAR) analysis, employing EViews 10 software. The study's findings indicate that inflation has a significant positive effect on economic growth. Meanwhile, regional tax revenue and government expenditure have a positive but not significant impact on economic growth. As a fiscal policymaker, the government must be cautious in managing the state revenue and expenditure budget, ensuring that sectors prone to price increases in goods and services are carefully monitored. Additionally, the government should continue to optimize regional tax collection while maintaining efficient spending to increase government savings, which are essential for development, particularly in opening economic sectors in underdeveloped areas.*

**Keywords:** *Economic, Growth, Inflation, Tax, Revenue.*

**Abstrak:** Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pendapatan pajak daerah dan pengeluaran pemerintah, karena kebijakan tersebut merupakan komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong PDRB. Disisi lain, Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak inflasi, pendapatan pajak daerah, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di pulau jawa tahun 2010-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Vector Autoregression (VAR) menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana sektor-sektor yang rentan menimbulkan kenaikan harga terhadap barang dan jasa di pasar harus benar-benar diperhatikan. Pemerintah juga harus terus berupaya menggali pajak daerah secara optimal, dan tetap memperhatikan pengeluaran serta efisiensi penggunaannya guna menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan, terutama untuk membuka sektor usaha ekonomi di daerah yang masih tertinggal.

**Kata kunci:** Pertumbuhan, Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Pajak.

## 1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan terus dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah ini dieksekusi melalui otonomi daerah dimana

pembangunan menjadi strategi utama agar terjadi perkembangan perekonomian yang dampaknya langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa yang akan mengacu pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Jhingan (2001) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Menurut Soekirno (2008) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi target utama sekaligus suatu keharusan dalam kelangsungan pembangunan ekonomi.

Hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat secara otomatis maupun dengan campur tangan pemerintah. Sirojuzilam (2015) dalam strateginya yang dikenal dengan strategi “*Redistribution With Growth*” mengemukakan, pelaksanaan pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana agar hasil pembangunan dapat merata, maka daerah yang miskin, tertinggal dan tidak produktif menjadi produktif yang akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Secara Administratif, pulau Jawa Terdiri dari 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, dan Banten. Hingga saat ini, pulau jawa menjadi pusat pembangunan dan konsentrasi ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2000 kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pulau jawa ke perekonomian indonesia adalah sebesar 60% dari total PDB Indonesia. Sementara pada tahun 2019, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pulau jawa sebesar 59% atau hanya turun 1% dalam kurun waktu 19 tahun terakhir. Meski Pulau Jawa menjadi pusat pembangunan di Indonesia, hal tersebut belum cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di dalamnya (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dari data Badan Pusat Statistik, perkembangan pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di Pulau Jawa selama 10 tahun terakhir (periode 2010 - 2019) mengalami kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB adalah berdasarkan harga konstan (PDRB Riil), sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya penambahan produksi (Mankiw, 2007).

**Tabel 1.** Data Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi di Pulau Jawa (2010-2019)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	6,51	6,70	5,34	4,92	4,81	4,84	4,84	5,21	5,22	6,23
Jawa Barat	5,89	5,01	4,82	4,70	3,52	3,52	4,17	3,91	4,24	3,21
JawaTengah	5,84	6,01	6,34	5,81	5,47	4,68	4,49	4,53	4,61	5,40
Jogjakarta	4,88	5,17	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87	4,11	5,07	6,60
Jawa Timur	6,68	7,12	5,90	5,37	5,18	4,80	4,96	4,87	4,94	5,32
Banten	5,94	6,43	4,40	5,31	3,24	3,24	3,14	3,65	3,80	4,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan tabel diatas, angka pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di pulau jawa mengalami fluktuasi atau terjadi ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dan hanya berkisar 4-5% pertahunnya. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Teori Jhon Maynard Keynes telah menjelaskan apa saja yang menyebabkan fluktuasi ekonomi, serta merumuskan suatu pendekatan guna mengatasi dampak-dampak terburuk yang ditimbulkan siklus bisnis. Diantara penyebab terjadinya fluktuasi adalah terdapat ketidakseimbangan dalam permintaan agregat akibat lambatnya upah dan harga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Dalam buku Boediono (2008), Keynes mengatakan bahwa untuk menolong sistem perekonomian negara, orang harus bersedia meninggalkan ideologi *laissez faire* murni yang terkandung dalam pemikiran Klasik. Pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan yang aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional, salah satunya dengan mengendalikan tingkat Inflasi.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw (2007) inflasi adalah seluruh kenaikan harga output dalam perekonomian. Badan Pusat Statistik mendefinisikan inflasi sebagai angka gabungan dari perubahan harga sekelompok komoditi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh komoditi barang dan jasa yang dijual di pasar. Pada kesejahteraan masyarakat, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat. Hal itu biasanya dialami para pekerja yang mempunyai penghasilan tetap karena pada umumnya kenaikan harga tidak secepat kenaikan upah sehingga menurunkan daya beli dan berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Menurut Gokal dan Hanif (2004) inflasi dapat menimbulkan ketidakpastian hasil investasi, mengurangi laju pertumbuhan probabilitas, mengurangi daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional karena

ekspor relatif lebih mahal sehingga memperburuk neraca pembayaran, mengganggu kinerja pasar finansial dalam hal interaksi antara kreditur dan debitur, serta menghambat optimalisasi produksi barang dan jasa karena tingginya biaya produksi.

Pemungutan pajak daerah saat ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memuat ketentuan pokok pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Pengertian Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Darwin (2010), pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah apabila pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas memperhatikan potensi daerah. Pemerintah daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya (Marihhot, 2005).

Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah. Hal itu karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong PDRB. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mardiasmo (2003) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat, terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan tepat sasaran dan digunakan untuk hal yang produktif dapat mempengaruhi aktifitas ekonomi, karena dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan (Sirojuzilam, 2015).

Berdasarkan evaluasi dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang bervariasi dan tidak konsisten atau terjadi "*Research Gap*" dari variabel inflasi, pendapatan pajak daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari "*Research Gap*" yang

terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai “Apakah Inflasi, Pendapatan Pajak Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi? Analisis Makroekonomi di Pulau Jawa”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2006). Adapun menurut Shumpeter, dalam Putong (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan.

### **Inflasi**

Menurut Muana Nanga (2005) Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Menurut Sadono Sukirno (2004) Inflasi adalah kenaikan harga umum yang berlaku dalam perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya atau secara terus menerus. Definisi di atas memberikan makna bahwa, kenaikan harga barang tertentu bukan termasuk Inflasi. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2004).

### **Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang tersebut, pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas memperhatikan potensi daerah (Darwin, 2010).

### **Pengeluaran Pemerintah**

Mardiasmo (2003) mendefinisikan belanja pemerintah daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah

merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Ali Akbar (2011) Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Hal tersebut berdasarkan Permendagri yang baru yaitu No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

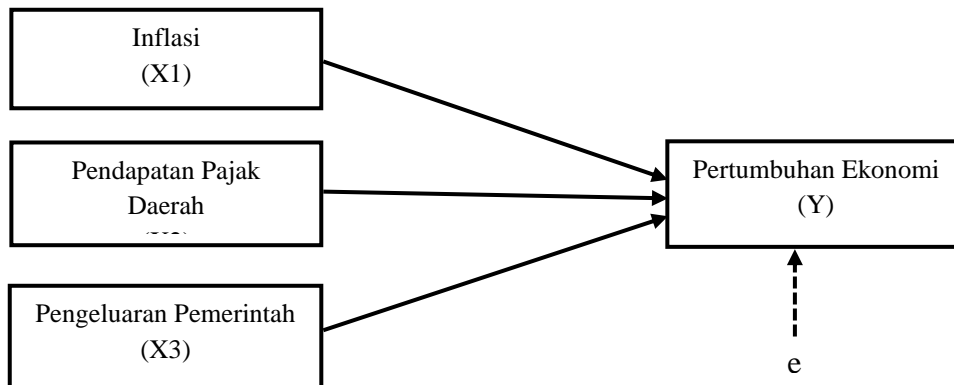
### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal dimana terdapat variabel bebas dan terikat. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiono, 2003). Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Sumber data penelitian ini yaitu laporan data yang berdasarkan laporan data Inflasi, Pendapatan Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa pertahun periode 2010-2019 yang diperoleh/diunduh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional dan Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrika *Vector Auto Regression (VAR)* dengan program Eviews 10. Model persamaan VAR sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PE_t &= \beta_{1i} + \sum \beta_{1i} PE_{-i} + \sum \gamma_{1i} Inf_{-i} + \sum \delta_{1i} PPD + \sum_{1i} PP_{t-1} + et \\ Inf_t &= \beta_{2-i} + \sum \beta_{2i} PE_{-i} + \sum \gamma_{2i} Inf_{-i} + \sum \delta_{2i} PPD + \sum_{2i} PP_{t-1} + et \\ PPD_t &= \beta_{3-i} + \sum \beta_{3i} PE_{-i} + \sum \gamma_{3i} Inf_{-i} + \sum \delta_{3i} PPD + \sum_{3i} PP_{t-1} + et \\ PP_t &= \beta_{4-i} + \sum \beta_{4i} PE_{-i} + \sum \gamma_{4i} Inf_{-i} + \sum \delta_{4i} PPD + \sum_{4i} PP_{t-1} + et \end{aligned}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} PE_t &= \text{Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahunan} \\ Inf_t &= \text{Angka Inflasi Tahunan} \\ PPD_t &= \text{Angka Pendapatan Pajak Daerah Tahunan} \\ PP_t &= \text{Angka Pengeluaran Pemerintah Tahunan} \\ \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 &= \text{Koefisien Regresi} \\ et &= \text{error term} \\ \delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4 &= \text{Uji root test} \end{aligned}$$



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X1 : Variabel Inflasi

X2 : Variabel Pendapatan Pajak Daerah

X3 : Variabel Pengeluaran Pemerintah

Y : Variabel Pertumbuhan Ekonomi

e : Variabel yang berpengaruh terhadap Y namun tidak diteliti

—————→ : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu (parsial).

- - - - - → : *Disturbance Error* (Kesalahan Pengganggu)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1) Uji Stasioneritas

Hasil Uji Stasioneritas masing-masing variabel secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	Nilai ADF	Critical Value 5%	Prob	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-4.314205	-2.913549	0.0011	Stasioner
Inflasi	-0.619036	-2.921175	0.8568	Tidak Stasioner
Pendapatan Pajak Daerah	-2.252715	-2.911730	0.1906	Tidak Stasioner
Pengeluaran Pemerintah	-2.946766	-2.911730	0.0461	Stasioner

*Sumber: Eviews 10 (Data Diolah)*

Dari Uji Stasioneritas yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa data variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pengeluaran pemerintah stasioner pada level. Sementara data variabel inflasi dan variabel pendapatan pajak daerah tidak setasioner pada level.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner secara keseluruhan. Maka solusinya adalah melakukan Uji Derajat Integrasi.

## 2) Uji Derajat Integrasi

Uji Derajat Integrasi dilakukan untuk mengetahui pada derajat berapa data akan stasioner. Jika data tidak stasioner pada level maka secara keseluruhan data yang digunakan adalah data *first defference*. Hal ini diperlukan untuk membentuk persamaan yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa lalu dan di masa yang akan datang. Sama seperti pada uji akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan nilai ADF *t-statistic* dengan nilai *Mc Kinnon Value*. Adapun hasil Uji Derajat Integrasi masing-masing variabel secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Hasil Uji Derajat Integrasi

Variabel	Nilai ADF	Critical Value 5%	Prob	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-8.558005	-2.912631	0.0000	Stasioner
Inflasi	-12.45842	-2.921175	0.0000	Stasioner
Pendapatan Pajak Daerah	-7.782153	-2.912631	0.0000	Stasioner
Pengeluaran Pemerintah	-7.920205	-2.912631	0.0000	Stasioner

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Berdasarkan Uji Derajat Integrasi yang telah dilakukan, diketahui semua data variabel yang digunakan dalam penelitian telah stasioner pada tingkat *first difference*. Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Panjang Lag Optimum untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhannya suatu variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya.

## 3) Uji Panjang Lag Optimum

Penentuan Lag Optimum ditentukan berdasarkan kriteria *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SIC)* ataupun *Hannan Quinnon (HQ)*. Tanda bintang (\*) menunjukkan lag optimal yang direkomendasikan. Hasil Uji Panjang Lag Optimum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.** Hasil Uji Panjang Lag Optimum

	Log	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-3581.094	NA	4.87e+51	130.3671	130.5131	130.4235
1	-3492.485	161.1085	3.48e+50	127.7267	128.4567	128.0090
2	-3459.655	54.91473	1.91e+50	127.1147	128.4286*	127.6228*
3	-3437.855	33.29576	1.58e+50	126.9038	128.8016	127.6377
4	-3422.050	21.83931	1.67e+50	126.9109	129.3927	127.8706
5	-3396.793	31.22691*	1.29e+50*	126.5743*	129.6400	127.7598



Dari hasil diatas terlihat bahwa tanda bintang paling banyak terdapat pada lag 5. Hal ini menunjukkan bahwa lag optimal terdapat pada lag 5. Lag Optimal berarti bahwa semua variabel saling mempengaruhi satu sama lain bukan hanya pada periode yang sama melainkan juga pada satu periode lainnya. Kemudian, karena panjang lag optimal sudah ditentukan, maka dapat dilakukan tahap pengujian selanjutnya, yaitu Uji Kointegrasi.

#### 4) Uji Kointegrasi (Metode Johansen)

Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Dengan kata lain, walau secara individual variabel-variabel tersebut tidak stasioner, namun kombinasi antar variabel tersebut dapat menjadi stasioner. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak. Apabila *trace statistic* lebih besar daripada *critical value* 0,05 maka hipotesis alternatif yang menyatakan jumlah kointegrasi diterima sehingga dapat diketahui berapa jumlah persamaan yang terkointegrasi dalam sistem. Jika terbukti ada kointegrasi, maka tahapan VAR dapat dilanjutkan. Namun jika tidak terbukti, maka VAR tidak bisa dilanjutkan. Hasil Uji Kointegrasi dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 5.** Hasil Uji Kointegrasi (Metode Johansen)

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.559982	95.91980	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.390935	49.12624	29.79707	0.0001
At most 2 *	0.237579	20.86388	15.49471	0.0070
At most 3 *	0.090424	5.402252	3.841466	0.0201

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* pada  $r = 0$  lebih besar dari *critical value* dengan tingkat signifikan 1%, 5% dan 10%. Hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada kointegrasi dapat ditolak. Berdasarkan analisis ekonometrika diatas dapat dilihat bahwa dalam taraf uji 5% terdapat 4 rank variabel berhubungan kointegrasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai *trace statistic* 95.91980, 49.12624, 20.86388 dan 5.402252 lebih besar dari *critical value* 0,05 yaitu 47.85613, 29.79707, 15.49471, dan 3.841466 yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain, variabel-variabel yang digunakan memiliki hubungan dalam jangka panjang (kointegrasi) satu dengan lainnya. Oleh karena itu estimasi *Vector Auto Regression*

(VAR) dalam penelitian ini dapat digunakan. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*).

**5) Uji Kausalitas Granger**

Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) bertujuan untuk melihat dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak diantara variabel-variabel yang di uji. Uji kausalitas *granger* pada penelitian ini menggunakan VAR *Pairwise Granger Causality Test*. Dengan menggunakan taraf alpha 0,05 dan panjang lag 2 sesuai pengujian panjang lag optimum untuk melihat hubungan kausalitas *granger* yang memiliki nilai *probability* lebih kecil dari alpha 0,05 maka hipotesis nol akan ditolak yang berarti suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Begitu juga sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis nol diterima. Hasil Uji Kausalitas Granger dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.** Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
INFLASI terhadap PERTUMBUHAN EKONOMI	58	6.04998	0.0043
PERTUMBUHAN EKONOMI terhadap INFLASI		5.24215	0.0084
PENDAPATAN PAJAK DAERAH terhadap PERTUMBUHAN EKONOMI	58	0.64497	0.5287
PERTUMBUHAN EKONOMI terhadap PENDAPATAN PAJAK DAERAH		0.74722	0.4786
PENGELUARAN PEMERINTAH terhadap PERTUMBUHAN EKONOMI	58	1.09185	0.3430
PERTUMBUHAN EKONOMI terhadap PENGELUARAN PEMERINTAH		0.34474	0.7100

*Sumber: Eviews 10 (Data Diolah)*

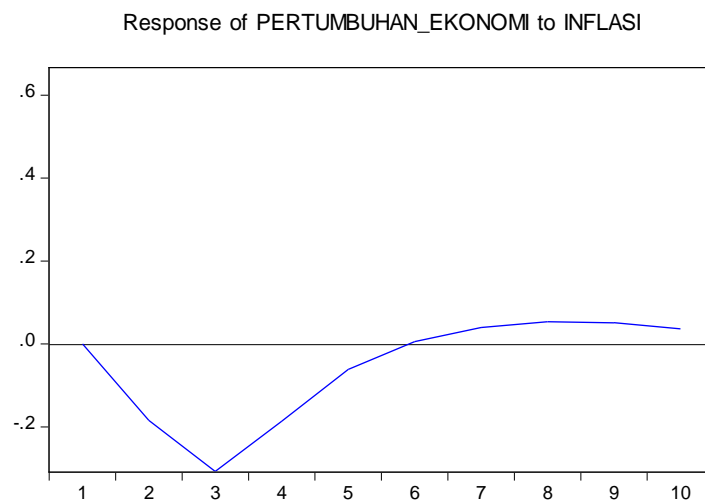
Dari hasil Uji Kausalitas Granger yang telah dilakukan, diperoleh hasil :

- a) Variabel Inflasi secara statistik signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.0043 sehingga menolak  $H_0$ . Begitu juga sebaliknya.
- b) Variabel Pendapatan Pajak Daerah secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.5287 sehingga menerima  $H_0$ . Begitu juga sebaliknya.

c) Variabel Pengeluaran Pemerintah secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.3430 sehingga menerima  $H_0$ . Begitu juga sebaliknya.

#### 6) Uji Respon Terhadap Adanya Inovasi (*Impulse Response Function*)

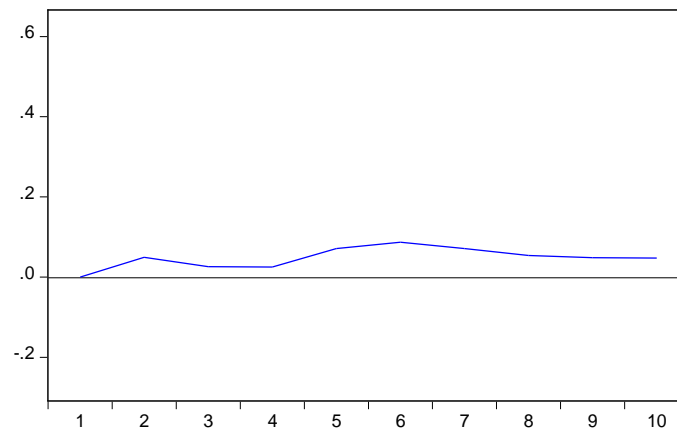
*Impulse Response Function* menelusuri pengaruh kontemporer dari satu standar *deviasi shock* dari satu inovasi terhadap nilai-nilai variabel endogen saat ini atau mendatang. Indikator kekuatan variabel dalam merespon *shock* suatu variabel diukur dengan *order of magnitude*. Jika *order of magnitude* suatu variabel semakin lebar maka semakin kuat variabel tersebut merespon *shock*. Indikator untuk kekuatan respon juga dapat dilihat dari Uji VD (*Variance Decomposition*). Sumbu Horizontal merupakan periode dalam tahun, sedangkan Sumbu Vertikal menunjukkan nilai respon dalam presentase. Hasil Uji Respon Terhadap Adanya Inovasi (*Impulse Response Function*) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.** Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi  
*Sumber: Eviews 10 (Data Diolah)*

Dari hasil pengujian diatas dapat dijelaskan bahwa respon pertumbuhan ekonomi terhadap *shock* inflasi adalah dari periode pertama sampai kesepuluh mengalami trend negatif dan positif. Namun cenderung lebih banyak di trend negatif. Hal tersebut ditunjukkan dari garis *Impulse Response Function (IRF)* yang berada lebih banyak di bawah daripada diatas garis horizontal

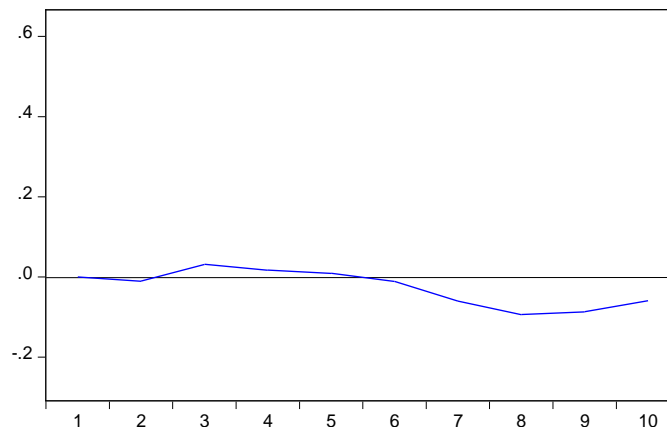
Response of PERTUMBUHAN\_EKONOMI to PENDAPATAN\_PAJAK\_DAERAH



**Gambar 3.** Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Pajak Daerah  
*Sumber: Eviews 10 (Data Diolah)*

Dari hasil pengujian diatas dapat dijelaskan bahwa respon pertumbuhan ekonomi terhadap *shock* pendapatan pajak daerah adalah dari periode pertama sampai kesepuluh mengalami trend positif. Hal tersebut ditunjukkan dari garis *Impulse Response Function (IRF)* yang berada diatas garis horizontal.

Response of PERTUMBUHAN\_EKONOMI to PENGELUARAN\_PEMERINTAH



**Gambar 4.** Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengeluaran Pemerintah  
*Sumber: Eviews 10 (Data Diolah)*

*Respon* pertumbuhan ekonomi terhadap *shock* pengeluaran pemerintah adalah dari periode pertama sampai kesepuluh mengalami trend negatif dan positif. Namun cenderung lebih banyak di trend negatif.

### 7) Uji Dekomposisi Varian (*Variance Decomposition*)

*Variance Decomposition* digunakan untuk menyusun perkiraan *error variance* suatu variabel, yaitu seberapa besar perbedaan antara variasi sebelum dan sesudah *shock*, baik *shock* berasal dari diri sendiri ataupun *shock* dari variabel lain atau untuk melihat pengaruh relatif variabel-variabel penelitian terhadap variabel lainnya. *Variance Decomposition*

menunjukkan kejutan hubungan *granger causality* yang mungkin ada diantara variabel-variabel.

**Tabel 7.** Hasil Uji *Variance Decomposition* Pertumbuhan Ekonomi

Periode	S.E.	Inflasi	Pendapatan Pajak Daerah	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi
1	0.665249	3.450742	0.985922	2.412210	93.15113
2	0.789642	12.60659	0.735504	2.387936	84.26997
3	0.910794	25.45319	0.553007	1.812879	72.18092
4	0.950070	28.69359	0.517117	1.674663	69.11463
5	0.955484	28.86726	1.020709	1.657203	68.45482
6	0.960039	28.60791	1.880311	1.648153	67.86362
7	0.965713	28.47758	2.425147	1.983842	67.11343
8	0.973289	28.33178	2.684270	2.910929	66.07302
9	0.979787	28.19699	2.871210	3.721062	65.21074
10	0.983481	28.10090	3.060040	4.094611	64.74445

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Uji *Variance Decomposition* menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dijelaskan oleh variabel sendiri mempunyai nilai *shock* antara 93% sampai dengan 64% pada periode 1 hingga periode 10.

**Tabel 8.** Hasil Uji *Variance Decomposition* Inflasi

Periode	S.E.	Inflasi	Pendapatan Pajak Daerah	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi
1	1.772302	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	1.901459	93.66159	4.297556	0.786494	1.254362
3	2.033720	88.26902	4.939770	1.132452	5.658762
4	2.224081	78.23991	7.365445	3.680509	10.71414
5	2.249751	77.52554	7.492253	3.598682	11.38352
6	2.287458	75.30542	7.381583	6.261171	11.05183
7	2.311269	73.94494	7.292604	7.794512	10.96794
8	2.312351	73.92304	7.319430	7.787283	10.97025
9	2.316757	73.65261	7.359837	8.058982	10.92857
10	2.318286	73.63558	7.350732	8.085654	10.92804

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Uji *Variance Decomposition* menunjukkan Inflasi mampu memberikan kontribusi terhadap *shock* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi antara 1,25% sampai dengan 10,92%.

**Tabel 9.** Hasil Uji *Variance Decomposition* Pendapatan Pajak Daerah

Periode	S.E.	Inflasi	Pendapatan Pajak Daerah	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi
1	4.34E+12	7.541490	92.45851	0.000000	0.000000
2	5.26E+12	6.008373	87.00226	6.773640	0.215731
3	6.75E+12	8.511870	61.26745	30.02163	0.199046
4	8.00E+12	10.61967	48.67905	40.36124	0.340036
5	8.68E+12	11.55235	45.78300	42.12619	0.538467
6	9.05E+12	11.42890	45.49151	42.21039	0.869198
7	9.31E+12	10.92004	44.89422	42.73464	1.451093
8	9.53E+12	10.42886	43.87845	43.58381	2.108881
9	9.70E+12	10.08450	43.22064	44.14416	2.550705
10	9.81E+12	9.879614	43.07223	44.28693	2.761223

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Uji *Variance Decomposition* menunjukkan pendapatan pajak daerah mampu memberikan kontribusi terhadap shock yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi antara 0,21% sampai dengan 2,76%.

**Tabel 10.** Hasil Uji *Variance Decomposition* Pengeluaran Pemerintah

Period	S.E.	Inflasi	Pendapatan Pajak Daerah	Pengeluaran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi
1	9.16E+12	20.32818	69.91079	9.761032	0.000000
2	1.01E+13	17.02341	74.35984	8.522572	0.094174
3	1.22E+13	14.50119	55.96081	29.42058	0.117422
4	1.44E+13	14.96307	44.22094	40.64182	0.174179
5	1.55E+13	15.97663	42.14727	41.66372	0.212393
6	1.61E+13	15.93440	42.59059	41.13775	0.337262
7	1.65E+13	15.33875	42.32990	41.54972	0.781630
8	1.68E+13	14.68218	41.29112	42.57555	1.451160
9	1.71E+13	14.21767	40.60447	43.25414	1.923715
10	1.73E+13	13.96178	40.53961	43.36814	2.130474

Sumber: *Eviews 10 (Data Diolah)*

Uji *Variance Decomposition* menunjukkan Inflasi mampu memberikan kontribusi terhadap shock yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi antara 0,09% sampai dengan 2,13%.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa.
- b. Variabel Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa.
- c. Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa.

### Saran

- a. Pemerintah harus tepat dalam membuat strategi pengendalian inflasi dan menghindari tingkat inflasi yang terlalu tinggi agar harga barang dan jasa atau inflasi bisa dikendalikan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana sektor-sektor yang rentan menimbulkan gejolak/kenaikan harga terhadap barang dan jasa di pasar harus benar-benar diperhatikan pemerintah.
- b. Pemerintah harus menggali pajak daerahnya secara optimal dengan tetap memperhatikan penghematan serta efisiensi penggunaannya guna menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan, terutama untuk membuka sektor usaha ekonomi di daerah yang masih tertinggal.
- c. Pemerintah harus tepat dalam mengelola pengeluaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah yang dialokasikan tepat sasaran dan digunakan untuk hal yang produktif dapat mempengaruhi aktifitas ekonomi, karena dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahadjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akbar, Mhd Ali, 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara". Tesis. USU.
- Andrea Vaona & Stefano Schiavo (2007) "Nonparametric and Semi-parametric Evidence on the Long-Run Effects of Inflation on Growth" *Economics Letters Vol.94* (3),452-458.
- Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Aziz Septiatin, Mawardi, Mohammad Ade Khairur Rizki (2016). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal I-Economic* Vol. 2. No.1
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. *Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2011-2018 (persen)*
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Boediono, 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Muda.
- Boediono, 2008. *Ekonomi Makro Edisi Empat*. Yogyakarta: BPFE
- Brotodihardjo. R. S. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chimobi, Omoke Philip (2010) "Inflation and Economic Growth in Nigeria". *Department of Economics, Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria* Vol. 3, No. 2
- Chinweoke N, Njoku Ray and Nwaeze (2014). "Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economics Growth (1992-2011)", *The Macrotheme Review*, Volume 3(7).
- Darwin, MBP. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi 1, Mitra Wicana Media, Jakarta.
- Dedi Rosadi (2011). *Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan R*. Yogyakarta : Andi Offset
- Dragos Mihai C (2013). "Governmental Expense, Tax Revenue and Total Tax Rate Effects on GDP in Global Economic Crisis: An Econometric Cross Sectional Approach", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Volume 3 Number 3.
- Efrizal Hasan, Syamsul Amar, Ali Anis (2014). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik* Vol. 1 No. 1.
- Folster, Stefan, (2001). "Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries", *European Economic Review*, Volume 45 Number 8.
- Gani, Irwan dan Siti Amalia. 2015. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Andi
- Gokal V, Hanif S. 2004. Relationship Between Inflation and Economic Growth. *Working Paper 2004/04*. Reserve Bank of Fiji.
- Gujarati, D.N, 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan



di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol.3.8

Jhingan, ML. 2001. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

John Loizides, George Vamvoukas (2005). Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*, Vol. VIII, No. 1.

Latumariessa, Julius R, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Jakarta

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.

Mangkoesebroto, Guritno, 2010. *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.

Mankiw, N. G., 2007, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mankiw, N. G., 2012. *Pengantar Ekonomi Makro. Principles Of Economics An Asian Edition-Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*, Percetakan Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Percetakan Andi, Yogyakarta.

Muana Nanga, 2005. *Makro Ekonomi. Edisi Kedua*. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Muqodim, 1999. *Perpajakan Buku Satu*. UII Press, Yogyakarta

Nopirin, 1987, *Ekonomi Moneter II*, edisi ke 1 BPFE, Yogyakarta

Nopirin, 1992, *Ekonomi Moneter II*, edisi ke 4 BPFE, Yogyakarta.

Otu, Helen Bukie, Theophilus, 2013. "The Effects of Tax Revenue on Economic growth in Nigeria (1970-2011)", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 2 Number 6.

Persada, Jakarta.

Prakarsa, Dwi Febrian, 2014. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Timur 2008-2012", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Volume 2 Nomor 2.

Pramesthi, Rovia Nugrahani (2013). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol.1 No.3

Prawoto, A. (2011). *Pengantar keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE.

Putong, 2010. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadono Sukirno, 2011. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Siahaan, Marihot P, 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi 1, Raja Grafindo
- Sirojuzilam, 2015. *Pembangunan Ekonomi Regional*, USU Press, Medan.
- Sudjana, 2006. *Metode Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas
- Sulong, Zunaidah dan Agus D Harjito, 2005. Linkages Between Foreign Direct Investment and Its Determinant in Malaysia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No.10 2005.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P. dan S.C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.